

**ANGKATAN BERSENJATA
DAN PENJESUAIAN
KEKUASAAN NEGARA
DENGAN TUGAS²
REVOLUSI**

D.N. AIDIT

**ANGKATAN BERSENDJATA
DAN PENJESUAIAN KEKUASAAN
NEGARA DENGAN TUGAS² REVOLUSI**

(PKI DAN ANGKATAN DARAT — SESKOAD)

II

Rian

D. N. Aidit
*Menko/Wakil Ketua MPRS dan
Ketua CC PKI*



**Isjasan „Pembaruan”
Djakarta 1964**

Sekedar Pengantar

Pada tanggal 1 Djuli 1964, Menko Wakil Ketua MPRS dan Ketua CCPKI D.N. Aidit, untuk kedua kalinya telah memberikan tjeramah didepan SESKOAD, Bandung. Kali ini temanja ialah *Sistim penjelenggaraan dukungan masjarakat (social support) dan pengawasan masjarakat (social control) bagi Republik Indonesia.*

Dengan persetujuan penulisnja singkatan tjeramah itu kami bukukan dengan judul *Angkatan Bersendjata dan penjesuaian kekuasaan negara dengan tugas revolusi*. Mudah²an penerbitan ini bisa sekedar memberi sumbangan pada melahirkan pengertian jang tepat mengenai pokok² tema jang dibahas jaitu „social control“, „social support“, „social participation“, kekuasaan negara dan revolusi Indonesia, baik dikalangan Angkatan Bersendjata chususnja maupun dikalangan Rakjat pada umumnja, sehingga akan memperkembangkan lebih landjut Dwitunggal Rakjat dan Angkatan Bersendjata guna menjelekakan revolusi nasional-demokratis dalam menuju ke Sosialisme Indonesia.

Penerbit

Djakarta, Djuli 1964.

Sdr². Djenderal, para perwira pimpinan dan dosen SESKOAD, para perwira siswa SESKOAD.

Ini adalah untuk kedua kalinya, bahwa saya sebagai Ketua Komite Central Partai Komunis Indonesia dan sebagai Menteri Koordinator/Wakil Ketua MPRS, diminta untuk memberikan tjeramah dimuka SESKOAD. Sewaktu saja memberikan tjeramah untuk pertama kalinya dimuka SESKOAD, yaitu pada tgl. 29 Juni 1963, saya mengatakan bahwa adanya tjeramah pemimpin kaum Komunis Indonesia dimuka anggota Angkatan Bersenjata RI „menandai tjiri yang khusus daripada keadaan politik dinegeri kita” dan bahwa tjiri yang khusus ini membedakan kita, misalnya, dengan negeri SEATO.

Selama masa satu tahun sedjak tjeramah itu, tjiri yang khusus daripada keadaan politik dinegeri kita telah semakin berkembang. Selama satu tahun itu berbagai tradisi yang baik daripada perjuangan revolusioner Rakyat Indonesia telah berkembang terus menerus, yaitu tradisi berjuang dan berkonfrontasi dengan imperialisme, tradisi mempererat solidaritet Asia-Afrika dalam melawan musuh bersama Rakyat sedunia, yaitu imperialisme AS, tradisi menggālang persatuan nasional revo-

lusioner antara seluruh kekuatan Rakjat Indonesia, tradisi anti-feodalisme, tradisi kerdjasama yang erat antara Angkatan Bersendjata RI dengan Rakjat Indonesia, djuga tradisi pemimpin² Komunis bertjeramah dimuka perwira² anggota Angkatan Bersendjata. Selama satu tahun ini saja djuga telah memberikan tjeramah² dihadapan perwira² ALRI dan AURI.

Dengan semakin berkembang tjiri² khusus, daripada perkembangan maju politik negeri kita, maka Indonesia mendjadi semakin berbeda dengan negeri² SEATO sehingga kedudukan kaum imperialis, terutama imperialis AS mendjadi makin gojah, bukan hanya di Indonesia tetapi djuga diseluruh Asia Tenggara. Keadaan politik di Indonesia memang baik sekali, dan ini tidak hanya membedakan Indonesia dari negeri² SEATO tetapi djuga ikut menggontjangkan SEATO itu sendiri. Indonesia telah membikin "horek" Asia Tenggara, sehingga kaum imperialis didaerah ini makin go-tjang kedudukannya.

Saja mengutipkan banyak terimakasih kepada pimpinan SESKOAD yang telah sekali lagi mengundang saya untuk bertjeramah disini. Ini sekali lagi merupakan sumbangan dalam memperkuat kerdjasama antara Angkatan Bersendjata RI, khususnya Angkatan Darat, dengan Rakjat Indonesia, khususnya dengan PKI. Mengapa Angkatan Bersendjata Republik Indonesia bisa bekerdjasama erat dengan Rakjat Indonesia, dengan kaum Ko-

munis Indonesia? Hal ini dijelaskan dalam salah-satu kesimpulan daripada tjeramah saja dimuka SESKOAD pada tgl 29 Djuni tahun jl, yaitu mengenai tjiri² Angkatan Bersendjata RI, dimana saja dje askan tjiri² yang pertama sbb: "Angkatan Bersendjata RI adalah anti-fasis, demokratis, anti-imperialis dan ber-tjita² Sosialisme Indonesia. Ia adalah alat untuk mengabdikan Revolusi Indonesia, untuk mengubah masyarakat Indonesia dewasa ini mendjadi masyarakat Indonesia yang merdeka penuh dan demokratis sebagai landasan untuk menuju ke Sosialisme. Maknanya, ia mengabdikan pada Rakjat berdjuaang untuk Rakjat dan terdiri dari Rakjat. Untuk dapat melaksanakan tugas²nja Angkatan Bersendjata RI yang djuga anggota Front Nasional berporoskan Nasakom, semestinja dipimpin oleh Program Bersama dari Revolusi Indonesia, yaitu Manipol dan pedoman² pelaksanaannya. Manipol adalah djuga doktrin Angkatan Bersendjata kita" (lihat D.N. Aidit, *PKI dan Angkatan Darat*, Jajasan Pembinaan, Djakarta, 1963, hal. 41).

Saja telah diminta oleh pimpinan SESKOAD untuk membahas suatu tema yang saja anggap sangat menarik dan berguna, yaitu *Sistem Penjenggaran, Dukungan Masyarakat (Social Support) dan Pengawasan Masyarakat (Social Control) bagi Negara RI*. Tema ini adalah berguna untuk dibahas terutama karena, seperti halnya dengan berbagai istilah yang sudah mendjadi sebagian

daripada bahasa kita sehari-hari², istilah² „social support” dan „social control” sering sekali dipakai tetapi begitu sering tidak dimengerti. Mudah-mudahan melalui pembahasan yang saya adjukan dalam tjeramah ini, kita akan mentjapai ber-sama² suatu pengertian yang tepat sebagai pegangan selanjutnya.

Adalah tepat pula apabila tema ini dibahas juga oleh pemimpin² partai² politik lainnya, seperti yang sedang dilakukan didalam SESKOAD angkatan ini. Seperti akan saya jelaskan dalam tjeramah ini, masalah „social support” dan „social control” justru adalah masalah partai² politik yang merupakan saluran² yang paling wajar bagi kedua kegiatan ini.

Saya anggap bahwa membahas tema sematjam ini dimuka salahsatu Sekolah daripada Angkatan Bersendjata adalah sangat berguna dan menarik. Mengapa? Karena „social support” dan „social control” menjangkut satu hal yang sungguh vital, yaitu hubungan antara Rakjat dengan Pemerintah, hubungan antara Rakjat dengan alat² negara, sedangkan Angkatan Bersendjata merupakan salahsatu bagian terpenting daripada alat² negara. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa dengan membahas masalah ini, kita sekaligus membahas pula sjarat untuk memperkembangkan Dwitunggal Rakjat dan Angkatan Bersendjata. Pengertian yang tepat didalam Angkatan Bersendjata tentang „social support” dan „social control” merupakan sa-

lahsatu sjarat terpenting bagi Angkatan Bersendjata tersebut untuk dapat melakukan pengabdianja kepada Rakjat dan Revolusi. Sebaliknya, pengertian yang keliru tentang hal² ini bisa merugikan kelandjutan Revolusi kita karena bisa menimbulkan kontradiksi² antara Rakjat dan Angkatan Bersendjata RI. Mengingat tjiri² daripada ABRI seperti telah saya kemukakan diatas, dan mengingat tjiri² Angkatan Bersendjata kita sebagai kaum tani bersendjata, maka seandainya kontradiksi² tsb. timbul, ini adalah sama halnya dengan timbulnja kontradiksi² didalam kalangan Rakjat sendiri, karena ABRI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rakjat Indonesia.

Kaum imperialis asing dan agen²nja didalam negeri selalu berusaha keras untuk mengadu-domba Rakjat Indonesia dengan ABRI dan ABRI dengan Rakjat. Mereka selalu menggambarkan se-akan² terdapat permusuhan antara kaum Komunis Indonesia dengan ABRI karena kepentingan² kaum imperialis memang membutuhkan adanya permusuhan yang demikian. Mereka tahu benar, bahwa dengan menimbulkan permusuhan yang demikian mereka akan bisa mengalihkan perjuangan Rakjat Indonesia dari sasaran yang tepat, yaitu kaum imperialis. Karena inilah kaum Komunis selalu mendjunjung tinggi sembojan „Dwitunggal Rakjat dan Angkatan Bersendjata”. Biarlah kaum imperialis berilusi tentang perseteruan antara ABRI dengan PKI, asal kita sendiri tidak mempunyai

tikiran jang demikian. Ada baiknja musuh² kita berfikiran keliru tentang kita.

Pimpinan SESKOAD telah meminta saja supaya membahas lima aspek masalah „social support” dan „social control”, jaitu (a) faktor² jang menjadi pertimbangan dalam menentukan „social support” dan „social control”, (b) bagaimana tentang filsafah, struktur dan pelaksanaannja. (c) hal² jang diperlukan untuk mensukseskan pelaksanaannja, (d) pengaruhnja terhadap kelantjaran dan kehidupan negara kita, dan (e) bagaimana tentang perkembangannja dalam waktu dekat ini. Dalam berusaha memenuhi permintaan ini saja akan membagi tjeramah ini dalam tiga bagian pokok, jaitu: *pertama*, masalah revolusi dan kekuasaan negara dalam hubungannja dengan „social support” serta „social control”, *kedua*, kekuasaan negara RI sekarang dan tugas² khusus „social support” serta „social control” dewasa ini, *ketiga*, sjarat² pelaksanaan „social support” dan „social control”, dan *keempat*, sembojan PKI „Tripanji Bangsa untuk Demokrasi, Persatuan dan Mobiliisasi”.

1

**Masalah Revolusi dan Kekuasaan Negara
Dalam Hubungannja dengan „Social
Support” dan „Social Control”**

Seperti sudah saja katakan dalam kata pengantar saja tadi, masalah „social support” dan „social control” menjangkut masalah hubungan aptara Rakjat dengan negara, antara Rakjat dengan Pemerintah jang memimpin negara. Oleh karena itu pembahasan ini perlu dimulai dengan uraian tentang masalah negara itu sendiri. Dan karena masalah negara tak mungkin dibahas setjara abstrak tetapi harus dibahas setjara kongkrit, artinja dalam keadaan kongkrit di Indonesia dan dalam hubungannja dengan Revolusi Indonesia, maka pembahasan masalah negara harus dipadukan dengan pembahasan soal² pokok Revolusi Indonesia.

Per-tama² kita harus menjawab pertanyaan, apakah negara itu? Pertanyaan ini telah dibahas dalam salahsatu kuliah Presiden Sukarno tentang „Pantjasila Sebagai Dasar Negara”, jaitu kuliah jang kedua jang diutjapkan oleh Bung Karno dalam kursus jang diberikan oleh beliau di Istana Negara dalam tahun 1958. Oleh Bung Karno,

pertanyaan itu dijawab dengan mengutip Karl Marx, bahwa „Negara adalah satu machtsorganisatie bahkan satu machtsorganisatie daripada sesuatu kelas untuk mempertahankan dirinya terhadap lain kelas”. (Lihat Presiden Sukarno, *Tjampkan Pantja Sila!* dikeluarkan oleh Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pantja Sila, hal. 71).

Selanjutnya dalam kuliah Presiden Sukarno yang ketiga tentang „Pantjasila Sebagai Dasar Negara” dijelaskan lebih lanjut bahwa „kita mempergunakan negara ini sebagai alat untuk mengubah susunan masyarakat, untuk merealisasi satu „masyarakat yang adil dan makmur”. Djuga dikatakan oleh Bung Karno dalam kuliah itu: „Negara adalah satu machtsorganisatie, negara adalah satu alat. Nah, alat ini kita gerakkan. Ke-luar, untuk menentang musuh yang hendak me-njerang kita, menentang intervensi, menentang peperangan, menentang apa saja dari luar. Keda-lam, negara ini djuga kita pakai untuk memberan-tas segala penjakit² didalam pagar, tapi djuga un-tuk merealisasi tjita² kita akan masyarakat adil dan makmur”. (Lihat Presiden Sukarno: *Tjampkan Pantja Sila!* hal. 115 dan 116).

Penggunaan ajaran Marx oleh Bung Karno sebagai dasar untuk menerangkan masalah negara adalah wadjar, karena ajaran² Marx memang merupakan sumber daripada teori revolusioner ten-tang negara, kekuasaan negara dan hubungannya dengan masalah revolusi.

Pembahasan tentang ajaran Marx mengenai masalah Negara telah dilakukan oleh W.I. Lenin setjara mendalam dalam bukunya *Negara dan Revolusi* dimana oleh Lenin disimpulkan bahwa negara „adalah sesuatu kekuasaan represif yang khusus” suatu „kekuatan khusus untuk menghantam kelas yang ditindas” (lihat *State and Revolution*, Foreign Languages Publishing House, Mos-cow, hal. 29 dan 31).

Selanjutnya dalam buku ini, yang ditulis dalam bulan Agustus 1917, Lenin membahas masalah negara dalam hubungannya dengan revolusi proletar yang berlangsung di Rusia dalam tahun 1917, dan melanjutkan pembahasannya dengan perta-njaan, sbb : „Klas yang mana yang harus dihantam oleh kaum proletar?”. Bagi Indonesia, pertanyaan yang amat penting ini bisa diterjemahkan sbb : „Klas² yang mana yang harus dihantam oleh Rak-jat Indonesia?” Bagi Indonesia yang sedang melangsungkan revolusi anti-imperialis, maka Bung Karno setelah dengan tepat mengatakan bahwa „suatu revolusi ditentukan oleh keadaan objektif daripada apa yang dihantam oleh revolusi dan dari-pada apa yang menghantam” (lihat *Tjampkan Pan-tja Sila!* hal. 41), kemudian menunjukkan bahwa revolusi di Indonesia berarti „menumbangkan im-perialisme” dan bahwa : „Revolusioner adalah tiap² orang yang menentang imperialisme” (*Tjampkan Pantja Sila!* hal. 63). Djadi jelaslah bahwa dalam Revolusi Indonesia, negara sebagai alat harus di-

pergunakan untuk menghantam klas² jang mewakili dan membela kepentingan² kaum imperialis.

Dalam salahsatu dokumen resmi Republik kita, jaitu didalam *Deklarasi Ekonomi* (Dekon), kita memperoleh gambaran jang lebih lengkap tentang tugas represif revolusi Indonesia pada dewasa ini, jaitu kewajiban untuk „mengkikis habis sisa² imperialisme dan sisa² feodalisme” dan karena ini merupakan „apa jang dihantam” oleh revolusi Indonesia, maka sifat revolusi kita pada tahap sekarang adalah „revolusi nasional dan demokratis”, nasional karena anti-imperialis, dan demokratis karena anti-feodal. Anti-feodal disini djanganlah diartikan anti-ningrat atau anti-Raden Mas, tetapi anti sistim politik dan ekonomi jang berlandaskan pemilihan tuantanah atas tanah.

Semuanya ini berarti, bahwa dalam Revolusi Indonesia, negara sebagai „kekuatan represif jang khusus” atau „machtsorganisatie” mempunyai tugas untuk menghantam imperialisme dan feodalisme dan dengan demikian negara mendjadi alat daripada semua golongan Rakjat jang anti-imperialis dan anti-feodal, atau seperti dikatakan dalam Manipol „konsentrasi kekuatan nasional”, jaitu „kekuatan seluruh Rakjat Indonesia, kekuatan seluruh bangsa jang menentang imperialisme-kolonialisme”. Menentang imperialisme-kolonialisme tidak bisa berarti lain bahwa djuga harus menentang feodalisme, karena *feodalisme adalah dasar sosial daripada imperialisme, dan kolonialisme adalah per-*

paduan daripada sistim politik dan ekonomi imperialis dengan sistim politik dan ekonomi feodal. Dan kalau kita berbitjara tentang kekuatan revolusi Indonesia menurut Manipol, tak boleh kita lupakan apa jang dikatakan oleh Manipol mengenai kaum buruh dan kaum tani sebagai „kekuatan pokok dalam Revolusi” dan sebagai „soko-guru” revolusi (*Tubapi*, hal. 82).

Mengingat hal² ini dapat disimpulkan, bahwa tugas Revolusi Indonesia ialah mendirikan negara jang merupakan alat dalam tangan „seluruh Rakjat Indonesia jang menentang imperialisme-kolonialisme”. Sifat negara jang demikian tentunya sangat berbeda dengan negara kolonial dan feodal atau setengah-feodal jang djustru merupakan alat dalam tangan kaum imperialis dan kaum feodal dan klas² jang meladeni kepentingan²nja, jang merupakan alat untuk menindas atau menghantam seluruh Rakjat. Disinilah bedanja antara apa jang dikatakan oleh Lenin sebagai sesuatu negara tipe lama, jaitu „sesuatu mesin negara, aparat dan organ administrasi (dengan) tentara tetap, polisi tetap dan birokrasi tetap jang punja hak istimewa dan berdiri diatas Rakjat” dengan suatu negara tipe baru dimana „Rakjat atas kemauan mereka sendiri sedang mentjiptakan demokrasi menurut tjara mereka sendiri”.

Revolusi dalam zaman manapun selalu membawa perubahan dalam kekuasaan negara. *Djustru perubahan kekuasaan negara itulah jang menentukan*

sifat sesuatu revolusi, karena seperti dikatakan oleh Bung Karno „kita mempergunakan negara ini sebagai alat untuk mengubah susunan masyarakat”, sedangkan kalau kekuasaan negara belum diubah sehingga sepenuhnya mewakili kelas² yang revolusioner, tak mungkin untuk menggunakan negara sebagai alat untuk melakukan tugasnya yang revolusioner itu, yaitu „mengubah susunan masyarakat”.

Tetapi revolusi² dalam sejarah manusia sampai kepada revolusi burjuis melawan feodalisme hanya menggantikan bentuk² penghisapan, misalnja dari penghisapan setjara feodal menjadi setjara kapitalis. Revolusi² itu tidak melenjapkan penghisapan dan hanya menggantikan kekuasaan suatu kelas minoritet yang satu dengan kelas minoritet yang lain, yang tetap menggunakan negara sebagai alat untuk „menghantam” mayoritas Rakyat yang ditindas.

Revolusi Indonesia merupakan revolusi anti-imperialis dan anti-feodal dan berperspektif Sosialisme. Artinya, bahwa revolusi Indonesia, setelah melaksanakan tugas² anti-imperialis dan anti-feodalnya, harus dilanjutkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, masyarakat yang bebas dari „l'exploitation de l'homme par l'homme”, atau masyarakat Sosialis Indonesia. Maka revolusi Indonesia tidak boleh mendirikan kekuasaan dari kelas minoritet, tapi mempunyai tugas untuk mendirikan kekuasaan dari mayoritas penduduk, atau menurut kata² Manipol „seluruh Rakyat yang me-

mentang imperialisme-kolonialisme” untuk mengikis habis kelas² yang hanya meliputi minoritet, yaitu kelas² yang mewakili atau membela kepentingan² imperialis dan feodal, atau setjara kongkrit, kaum imperialis, kaum feodal, kaum kapitalis komprador dan kaum kapitalis birokrat. Dalam pidato Bung Karno „Lahirnja Pantjasila” pada tgl 1 Juni 1945, tentang ini dikatakan, bahwa Rakyat Indonesia harus mendirikan „negara Gotongrojong”.

Dalam negara² yang mewakili kelas² minoritet untuk menindas Rakyat banyak, tetap terdapat pertentangan hebat antara kekuasaan negara dengan Rakyat banyak. Tetapi tugas Revolusi Indonesia ialah untuk mendirikan negara yang mewakili dan mentjerminkan kepentingan² Rakyat banyak. Dalam rangka inilah dapat kita membitjarkan masalah „social support” (dukungan masyarakat) dan „social control” (pengawasan masyarakat) bahkan perlu dilengkapi dengan „social participation” (pengikutsertaan masyarakat). Memang dukungan masyarakat, pengawasan masyarakat dan pengikutsertaan masyarakat dalam arti dukungan, pengawasan dan pengikutsertaan mayoritas Rakyat, hanya mungkin ditjapai dalam rangka mendirikan negara yang mewakili kepentingan² Rakyat banyak, dalam rangka pelaksanaan revolusi dari Rakyat banyak. Dan harus diingatkan pula bahwa mendirikan negara yang mewakili Rakyat banyak hanyalah mungkin dengan adanya dukungan, pengawasan dan pengikutsertaan masyarakat.

Dengan pendjelasan ini, dapatlah difahami bahwa „social support” dan „social control” tidak mempunyai arti apapun jika tidak dibahas dalam hubungannya dengan sesuatu revolusi sematjam Revolusi Indonesia. Dalam negara yang bersifat kolonial ataupun yang bersifat imperialis dan kapitalis, istilah „social support” dan „social control” tidak mempunyai arti apapun ketjuali sebagai hiasan untuk tipuan belaka. Kekuasaan negara yang demikian tak mungkin memperoleh „social support” yang sungguh², karena ia hanya mewakili kepentingan² klas minoritet. Djuja fungsi pengawasan hanya dilakukan oleh klas yang diwakili kepentingan²nja untuk menjaga supaya kekuasaan negara atau pemerintah selalu berbuat sesuai dengan kepentingan² klas tsb. Bagi Rakjat banjak dalam negeri sematjam itu tentu tidak ada masalah „social support”, pun „social control”. Jang ada jalah „social opposition” atau „perlawanan masjarakat” jang achirnja akan mentjetus dalam revolusi untuk menggantikan kekuasaan jang ada dan mendirikan kekuasaan dari majoritet.

Dengan pendjelasan ini dapat kita lihat pula, bahwa fungsi² dukungan dan pengawasan ke-dua²nja merupakan fungsi jang dilakukan oleh klas² jang kepentingan²nja diwakili oleh negara jang bersangkutan, dan oleh karena itu, dua fungsi tsb merupakan suatu kesatuan jang bulat, jang tak ter-pisah²kan satu dengan jang lain. *Jang didukung harus bisa diawasi, karena jika tidak, dukungan*

tak akan bisa dimobilisasi, sedangkan pengawasan merupakan sikap jang positif jang hanya mungkin dilakukan terhadap sesuatu jang didukung. Jika jang didukung tidak bisa diawasi dapat terdjadi bahwa dukungan akan disalahgunakan, ditipu dan dichianati, akan merupakan penipuan dan pengchianatan. Disinilah letaknja kebohongan daripada dalih² sementara orang jang takut akan pengawasan Rakjat dan oleh karenanja suka mengatakan bahwa jang harus diutamakan jalah „social support” dan bukan „social control”. Ini tidak lain merupakan akal bulus untuk memaksa Rakjat memberikan dukungannja tanpa melakukan pengawasannja. Tidaklah mengherankan jika djustru kaum kapitalis birokrat jang mengadjak Rakjat untuk „mengutamakan dukungan”, apalagi dalam keadaan seperti dewasa ini dimana Rakjat semakin tadjam melakukan pengawasannja, terutama dalam menuntut rituling semua oknum² kontra-revolusioner, termasuk kaum kapitalis birokrat sendiri.

Satu hal jang perlu ditekankan dalam rangka membahas „social support” dan „social control” jalah, bahwa karena revolusi Indonesia merupakan revolusi daripada Rakjat banjak, revolusi seluruh kekuatan rasional, maka persatuan nasional merupakan kebutuhan mutlak dalam perdjjuangan Rakjat Indonesia untuk memenangkan revolusinja. „Social support” dan „social control” mempunyai peranan jang penting sekali bukan hanya dalam mendukung dan mengawasi kekuasaan negara, te-

tapi juga dalam terus-menerus memupuk persatuan nasional. Kaum Komunis sepenuhnya berdiri dibelakang Bung Karno yang sedjak dahulu selalu mentjurahkan segenap tenaganya pada tugas yang mulia dalam memupuk dan memperkuat persatuan nasional. Kaum Komunis Indonesia menjetudjui dan menjambut hangat seruan Bung Karno tahun jang lalu di Purwokerto agar setiap golongan dan partai politik ber-lomba² dalam memperdjuangkan pelaksanaan konsekwen daripada program bersama Rakjat Indonesia, jaitu Manipol. PKI tidak hanja menjetudjui, tetapi ikut setjara aktif dalam kompetisi ini.

Hal ini perlu difahami setjara mendalam, karena „social support” dan „social control” perlu dilaksanakan setjara bekerdjasama dan setjara berlomba atau berkompetisi Manipolis, dan tidak setjara bermusuh²an antara kekuatan² revolusioner. Perlombaan Manipolis berarti perlombaan antara partai² politik untuk paling banjak memobilisasi „social support” dan „social control”, semuanya dengan satu tudjuan, jaitu pelaksanaan Manipol, program bersama seluruh Rakjat Indonesia. Kekuatan² Rakjat Indonesia, jaitu semua klas revolusioner, jang diwakili oleh partai² politik mereka masing², harus berbuat apa sadja untuk menggalang persatuan nasional guna menyelesaikan revolusi Indonesia. Dalam pengertian inilah, klas buruh Indonesia dengan partainya, PKI, bersedia meletakkan kepentingan nasional diatas kepentingan klas.

Mengenai hal persatuan nasional dalam hubungannya dengan teori tentang revolusi Indonesia, kaum Komunis Indonesia telah berhasil menjusun suatu rumusan jang sederhana, dengan maksud untuk memperkokoh pengertian tentang mutlak perlunya persatuan nasional sambil menundjukkan dengan djelas komposisi klas dan hubungan masing² klas dalam persatuan nasional itu. Rumusan ini dinjatakan dalam lima kata sadja, dalam lima kata jang gampang sekali diingat oleh siapapun, jaitu: *do, do, re, mi, fa* (1. 1. 2. 3. 4).

Do (1) jang pertama berarti *satu* kekuatan pelopor revolusi Indonesia jaitu klas proletar. Klas ini mendjadi pelopor karena ia paling konsekwen dalam menentang imperialisme dan feodalisme, karena ia klas jang paling revolusioner, klas jang paling berkepentingan akan tertjapainya Sosialisme, klas jang paling mampu dalam memperdjuangkan teori revolusioner untuk terus-menerus membimbing revolusi. Dalam tulisannya „*Marhaen dan proletar*” Bung Karno djuga berkata bahwa „barisan pelopor kita adalah barisannya kaum buruh, barisannya kaum proletar” (*Dibawah Bendera Revolusi*, hal. 256).

Do (1) jang kedua berarti *satu* kekuatan pokok, jaitu kaum tani. Kaum tani merupakan kekuatan pokok revolusi karena hakekat revolusi Indonesia ialah revolusi agraria jang mempunyai tugas melaksanakan perubahan² agraria dan menghapuskan penindasan serta penghisapan feodal. Kaum

tani meliputi bagian terbesar daripada penduduk Indonesia dan selama bagian yang terbesar itu belum bangkit dan ikut dalam revolusi, tidaklah mungkin untuk memenangkan revolusi kita.

Re (2) berarti *dua* kekuatan yang menjadi basis persatuan nasional, yaitu persekutuan kaum buruh dan kaum tani. Persatuan nasional Rakjat Indonesia hanya bisa kokoh jika persekutuan antara dua kekuatan ini adalah kuat dan tak-tergojahkan.

Mi (3) berarti *tiga* kekuatan pendorong revolusi, yaitu kaum buruh, kaum tani dan burdjuasi kecil yang semuanya itu adalah Rakjat pekerdja, Rakjat yang tidak melakukan penghisapan terhadap orang lain dan yang oleh karenanya bisa menjadi pendorong terus-menerus bagi revolusi yang perspektifnya ialah penghapusan penghisapan atas manusia oleh manusia.

Fa (4) berarti *empat* kekuatan front nasional, yaitu kaum buruh, kaum tani, burdjuasi kecil dan burdjuasi nasional. Empat kekuatan nasional ini mempunyai kepentingan yang sama, yaitu menumpas imperialisme dan feodalisme karena mereka semua menderita karena penindasan dan penghisapan imperialisme dan feodalisme. Merekalah „seuruh Rakjat Indonesia yang menentang imperialisme-kolonialisme” atau yang harus merupakan „samenbundeling van alle revolutionaire krachten”.

Disamping rumusan itu, yang menjelaskan kom-

posisi kelas daripada kekuatan revolusi Indonesia dan saling hubungannya dalam front persatuan nasional, perlu juga dikemukakan peranan gagasan Nasakom dalam menggalang front persatuan nasional dinegeri kita. Gagasan Nasakom merumuskan aliran² terpenting dalam masyarakat Indonesia yang perlu dihimpun, yaitu aliran nasionalis, aliran agama dan aliran komunis sebagai kenyataan² yang hidup dikalangan Rakjat Indonesia. Gagasan Nasakom telah lahir sedjak tahun 1926, yaitu dengan adanya tulisan Bung Karno yang sudah terkenal, yaitu „*Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme*” yang untuk pertama kalinya mentjetuskan ide kerjasama antara aliran² tersebut. Sedjak saat itu, semua tulisan Bung Karno, semua pidatonya dan juga semua kegiatan²nya ditujukan kepada tugas besar kita bersama, yaitu menggalang dan terus-menerus memperkuat persatuan nasional.

Adalah menjadi kejakinan kaum Komunis Indonesia bahwa gagasan persatuan Nasakom yang dikembangkan oleh Bung Karno sedjak tahun 1926 itu bukan hanya mempunyai arti nasional tetapi juga mempunyai arti internasional, terutama bagi nasion² tertindas yang sedang melakukan perjuangannya revolusioner melawan imperialisme, karena salahsatu djimat bagi setiap nasion tertindas untuk melawan imperialisme ialah persatuan nasional revolusioner.

Didalam tulisan Bung Karno yang terkenal itu, dikatakan sbb: „*Mempeladjar, mentjahari hubu-*

ngan antara ketiga sifat itu (Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, DNA), membuktikan, bahwa tiga haluan ini dalam suatu negeri djadjahan tak guna berseteruan satu sama lain, membuktikan pula, bahwa ketiga gelombang ini bisa bekerdja ber-sama-sama mendjadi s a t u gelombang jang maha-besar dan maha-kuat, s a t u ombak-taufan jang tak dapat ditahan terdjangnja, itulah kewadajiban jang kita semua harus memikulnja." (Dibawah Bendera Revolusi, hal. 2).

Demikian tugas jang dipikul oleh Bung Karno sedjak tahun 1926, jaitu hampir 40 tahun jang lalu, tugas jang dilakukan beliau sampai saat ini. Salahsatu usaha terpenting dari Bung Karno dalam memperkokoh gagasan Nasakom sebagai poros daripada persatuan nasional ialah pidato „Lahirnja Pantjasila" dalam bulan Djuni 1945 jang menegaskan bahwa djika Pantjasila diperas mendjadi satu maka hasilnja ialah gotong-rojong, sedangkan hakekat daripada gotong-rojong telah ditegaskan oleh Bung Karno dalam pidatonja tentang Konsepsi Presiden dalam bulan Februari 1957 dimana gotong-rojong didjelaskan sebagai „samenbundeling van alle revolutionaire krachten".

Gagasan Bung Karno jang ditulis hampir 40 tahun jl tetap mendjadi gagasan jang segar, jang tjotjok, jang harus mendjadi pedoman untuk setiap patriot Indonesia dalam menggalang front persatuan nasional. Melakukan tugas „social support" dan „social control" harus beranti sekaligus

melaksanakan tugas seperti dirumuskan hampir 40 tahun jl oleh Bung Karno, karena hanja dengan melaksanakan tugas itu, kita dapat memadjukan dan merealisasi fungsi² „social support", „social control" dan „social participation".

Kekuasaan Negara di Indonesia Sekarang dan Tugas² Khusus „Social Support” serta „Social Control” Dewasa ini

Setelah menjelaskan masalah kekuasaan negara dalam sesuatu revolusi pada umumnya dan masalah kekuasaan negara dalam revolusi Indonesia khususnya, saya ingin sekarang mengemukakan pandangan kaum Komunis tentang kekuasaan negara di negeri kita pada dewasa ini dan tugas² khusus „social support” dan „social control” dalam hubungannya dengan masalah ini.

Sudah menjadi suatu pengertian umum bahwa revolusi Indonesia belum selesai, tetapi mengenai rumusan inipun dibutuhkan suatu pembahasan yang lebih mendalam untuk benar² bisa memahami maknanya. Kalau revolusi Indonesia belum selesai, maka adalah wajar bila kita menanyakan: „Djadi, kita sudah sampai dimana dalam menyelesaikan Revolusi kita itu?”. Dalam menjawab pertanyaan itu, kita harus pertama² menekankan kepada hal yang sangat penting, yaitu bahwa Revolusi Indonesia terdiri dari dua tahap. Manipol menegaskan tentang adanya dua tahap revolusi kita. Deklarasi

Ekonomi juga menegaskan tentang adanya dua tahap sbb: „..... dalam tahap pertama kita harus mentjiptakan susunan ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis, yang bersih dari sisa² imperialisme dan bersih dari sisa² feodalisme. Tahap pertama adalah persiapan untuk tahap kedua, yaitu tahap ekonomi Sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia, tanpa 'l'exploitation de l'homme par l'homme'.” (Dekon, fasal 3). Selanjutnya dikatakan: „Kita sekarang sedang berada dalam tahap pertama Revolusi kita. Kewajiban kita dibidang ekonomi dalam tahap ini ialah mengikis habis sisa² imperialisme dan sisa² feodalisme dibidang ekonomi, menggerakkan semua potensi nasional untuk meletakkan dasar dan mempertumbuhkan suatu ekonomi nasional yang bebas dari imperialisme dan feodalisme sebagai landasan menuju kemasjaraat Sosialis Indonesia”. (Dekon, fasal 4).

Dalam pidato Gesuri, tgl. 17 Agustus 1963, Presiden Sukarno dengan lebih tegas lagi mengatakan, bahwa „Dengan adanya Dekon, orang tidak diperkenankan lagi mengkisruhkan dua tahap revolusi. Disatu pihak tidak ditolerir pendapat yang menjangkal, bahwa haridepan kita adalah sosialisme Difiihak lain, tidak ditolerir pendapat bahwa sosialisme bisa diselenggarakan 'satu kali pukul' tanpa menyelesaikan lebih dulu perjuangan nasionalis-demokratis, yaitu tanpa menghabis-tamatkan lebih dahulu sisa² imperialisme dan

feodalisme. Dekon mengatakan hal ini dengan jelas dan tegas! Karena itu saja pun sering sekali menandakan bahwa kita sekarang belum berada dalam alam sosialisme". (lihat *Gesuri* penerbitan khusus Departemen Penerangan no. 280, hal. 32 dan 33).

Kutipan² ini menegaskan dengan jelas, bahwa bukan hanya revolusi kita yang harus melalui dua tahap itu belum selesai, tetapi malahan tahap pertamapun belum selesai. Penegasan ini sungguh penting sekali untuk dapat menentukan taktik perjuangan kita, untuk mengetahui dan menetapkan dengan jelas musuh² revolusi kita pada saat ini. Pradjurit dimanapun akan dapat memahami bahwa pertempuran tak dapat dilakukan djika sebelumnya tidak jelas siapa² musuh²nja. Sama djuga halnja dengan suatu revolusi. Jang harus jelas lebih dahulu jalah siapa² musuh²nja „siapa jang harus dihantam” untuk menggunakan kata² Bung Karno. Disini antara lain letaknja sifat ilmiah daripada Manipol serta Dekon jang lebih memperintjikan persoalannja, jaitu menegaskan dengan tidak ragu² bahwa musuh² Revolusi Indonesia pada tahap sekarang jang belum selesai itu jalah imperialisme dan feodalisme.

Kalau Dekon sampai kepada kesimpulan jang demikian, jaitu bahwa pun tahap pertama revolusi belum selesai, ini membutuhkan dari kita suatu pengertian tentang hal jang penting sekali, jaitu mengapa sampai sekarang tahap ini belum bisa

diselesaikan? Seperti sudah saja kutip diatas, Bung Karno telah mendjelaskan negara sebagai alat untuk menghantam apa jang harus dihantam oleh revolusi dan untuk menjusun masjarakat baru. Kenyataan bahwa tugas ini belum selesai menundjukkan bahwa negara kita sendiri, atau lebih tepatnja kekuasaan negara, belum sepenuhnya sesuai dengan tugas jang harus dilakukannya dalam tahap pertama ini, tahap anti-imperialis dan anti-feodal, tahap nasional dan demokratis. Djadi, persoalannja jalah: *penjesuaian kekuasaan negara dengan tugas² revolusi, penjesuaian tugas dan tudjuan dengan alat.*

Kenyataan menundjukkan bahwa pada kekuasaan negara dinegeri kita masih terdapat dua segi, segi jang pro-Rakjat dan segi jang anti-Rakjat. Segi pro-Rakjatnja melakukan perjuangan sesuai dengan tugas² revolusi kita pada tahap sekarang, jaitu mengganjang musuh² revolusi kita sesuai dengan apa jang dikatakan didalam Manipol dan Dekon. Tetapi segi anti-Rakjatnja menentang perjuangan ini dan dengan berbagai dalih serta kegiatan selalu menghambat penyelesaian tugas² revolusi kita. Adanja dua segi berarti bahwa negara belum bisa digunakan sepenuhnya sebagai alat untuk menghantam musuh² revolusi. Analisa ini membantu kita untuk mengerti mengapa revolusi kita belum selesai, dan ia djuga membantu kita dalam memahami mengapa masalah kekuasaan negara adalah sedemikian penting dalam menyelesaikan

kan suatu revolusi. Pengalaman revolusi Indonesia sendiri membuktikan bahwa *selama kekuasaan negara belum sepenuhnya sesuai dengan tugas dan tujuan revolusi*, memang tak mungkin negara akan bisa dipakai sebagai „alat untuk mengubah susunan masyarakat”.

Dalam keadaan yang demikian, maka „social support” dan „social control” yang dilakukan oleh Rakjat Indonesia pada dewasa ini mempunyai suatu tugas yang khusus, yaitu untuk memberikan dukungan dan dorongan penuh kepada segi pro-Rakjat, dan untuk menunduk, mengawasi dan mengachiri segi anti-Rakjat. Hal ini mutlak perlu dilakukan djika tahap pertama revolusi kita mau diselesaikan. Karena itu, bisa dikatakan, bahwa melalui „social support” dan „social control” Rakjat Indonesia berdjuaug untuk menjelesaikan revolusinja.

Mengapa bisa dikatakan bahwa pada kekuasaan negara dinegeri kita terdapat dua segi? Mari kita mengambil beberapa tjontoh yang sederhana.

Salahsatu tugas pokok revolusi kita ialah menghantam atau mengikis habis sisa² feodalisme. Dinegeri kita sisa² feodalisme berbentuk pemilikan tanah oleh tuantanah² yang menggunakan tanah itu sebagai alat penghisapan melalui sewa tanah, disamping berbagai bentuk penghisapan lain, seperti idjon, lintahdarat, tengkulak² yang memonopoli hasil bumi kaum tani, dsb. Sisa² feodalisme ini hanya dapat diachiri melalui landreform yang radikal.

Tentang hal ini, oleh Presiden Sukarno dikatakan dalam pidato *Djarek*, 17 Agustus 1960 sbb: „Revolusi Indonesia tanpa landreform adalah sama sadja dengan gedung tanpa alas, sama sadja dengan pohon tanpa batang, sama sadja dengan omong-besar tanpa isi. Melaksanakan landreform berarti melaksanakan *satu bagian yang mutlak dari Revolusi Indonesia*. tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan Tanah untuk Tani! Tanah untuk mereka yang betul² menggarap tanah! Tanah tidak untuk mereka yang dengan duduk ongang² menjadi gemuk-gendut karena menghisap keringatnja orang² yang disuruh menggarap tanah itu!” (lihat *Tubapi*, hal. 223-224). Dari uraian Presiden Sukarno ini menjadi gamblang definisi daripada tuantanah, yaitu *orang yang ongang² tidak bekerdja, hidup dari menghisap keringat orang² yang disuruh menggarap tanahnja*.

Apa yang telah dibuat mengenai tugas ini? Berkat adanya segi pro-Rakjat, yang dengan kuat didukung oleh kekuatan² progresif, terutama oleh gerakan tani yang meningkat dan wakil² gerakan tani dan Rakjat pekerdja lainnja dalam Parlemen, maka telah diundangkanlah suatu undang², yaitu Undang² Pokok Agraria (UUPA). Undang² ini belum bisa dikatakan mengikis habis sisa² feodal karena masih memungkinkan adanya pemilikan tanah oleh tuantanah². Dibeberapa daerah UUPA malahan bisa melegalkan dan menambah djumlah tuantanah seperti di-tanah² bekas pemilikan komu-

nal, Bung Karno pernah mengatakan setjara tepat bahwa landreform berdasarkan UUPA merupakan tindakan dalam rangka usaha² „mengachiri penghisapan feodal setjara ber-angsur²“ („Djarek“, lihat *Tubapi*, hal. 224). Disamping UUPA, djuga sudah diadakan Undang² Perdjandjian Bagi Hasil (UUPBH) jang sedikit membatasi penghisapan feodal dengan menetapkan bahwa bagian daripada hasil tanah jang diserahkan oleh penggarap kepada pemilik tanah tidak lebih daripada 50 persen hasil bersih, artinja setelah dipotong ongkos² produksi jang dikeluarkan oleh penggarap. Tentang undang² ini, Bung Karno pernah mengatakan dengan tepat bahwa ia „agak menguntungkan kaum tani“ (*Takem*, Dep. Penerangan Penerbitan Khusus no. 225, hal. 39).

Kedua undang² ini dengan demikian dapat mengurangi sisa² feodalisme atau mengurangi penghisapan dan kekuasaan tuantanah dan oleh karenanya bisa dikatakan progresif. Tetapi undang² jang meskipun masih bersifat terbatas ini ternyata pelaksanaannja berdjalan „seperti keong“, untuk memindjam kata² Bung Karno. Bahkan seperti keongpun tidak, karena betapapun per-lahan²nja, keong toh bisa berdjalan madju, sedangkan pelaksanaan UUPA matjet samasekali atau malahan mundur dalam arti dilaksanakan menjeleweng. Djadi keong masih mendingan!

Baru² ini, selama bulan Februari, Maret, April dan Mei saja sendiri telah memimpin suatu ge-

rakan riset jang meliputi seluruh pulau Djawa, dan dalam riset itu telah diselidiki keadaan didalam desa² di 124 ketjamatan di Djawa jaitu 24 ketjamatan di Djawa Barat, 30 ketjamatan di Djawa Tengah dan 70 ketjamatan di Djawa Timur. Kalau saja tidak salah, ini merupakan pekerdjaan riset jang paling luas jang pernah dilakukan dinegeri kita. Di-mana² saja telah menemukan fakta² jang sepenuhnya membenarkan kritik tadjam jang pernah dikeluarkan oleh Bung Karno mengenai pelaksanaan kedua undang² itu.

Walaupun Pemerintah telah menjusun berbagai rentjana, walaupun berbagai keputusan, instruksi dan matjam² lagi telah dikeluarkan dan dikirimkan kepada instansi² di-daerah², namun kenjataanja masih tetap sama, pelaksanaan kedua Undang² itu masih belum berdjalan sebagaimana mestinja, sehingga perlu diadakan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria no. 4/1964 jang memuat sanksi² terhadap tuantanah jang tidak melaksanakan UUPBH. Sekalipun sudah demikian, djuga belum berdjalan pelaksanaan undang² tsb. Bukankah ini membuktikan tentang adanya dua segi dalam kekuasaan negara? Jaitu segi pro-Rakjat jang bisa menggolkan undang² jang agak progresif, tetapi segi anti-Rakjat jang menghalangi pelaksanaanja.

Didalam riset jang telah saja pimpin itu, saja telah memperoleh banjak sekali fakta² jang menunjukkan, bahwa kaum tani Djawa sudah meng-

ambil sikap yang sangat tepat, yaitu sikap yang sepenuhnya sesuai dengan sifat mereka sebagai „soko-guru revolusi” seperti dikatakan dalam Manipol, sebagai kekuatan pokok revolusi, dan dengan bertekad melakukan aksi² sefihak untuk melaksanakan-undang² itu. Aksi² sefihak adalah sepenuhnya sah karena tujuannya ialah untuk melaksanakan undang² yang telah dibuat oleh Parlemen dan untuk berlakunya ditandatangani oleh Presiden yang menurut ketentuan Menteri Pertanian dan Agraria sendiri harus sudah selesai di Djawa dalam tahun 1963. Sekarang sudah tahun 1964, dan kalau kaum tani tidak melakukan aksi sefihak tidak akan ada realisasi daripada undang² tsb. Aksi² sefihak itu adalah sepenuhnya sesuai dengan tujuan revolusi kita karena dilakukan dengan mendjung tinggi sembojan „tiga-untung” yaitu untung bagi Pemerintah, untung bagi kaum tani, untung bagi revolusi. *Untung bagi Pemerintah*, karena kaum tani sudah tidak lagi mau setor sebagian daripada hasil tanah lebih yang belum di UUPA-kan kepada tuantanah tetapi hanya mau setor kepada Pemerintah, sedangkan mengenai tanah garapan dibawah batas maximum dimana tuantanah belum mau mengadakan perdjandjian dengan penggarap sesuai dengan UUPBH, kaum tani telah memutuskan untuk mengambil 6 bagian, dan 4 bagian selebihnya dibagi: 2 bagian untuk Pemerintah dan 2 bagian lagi untuk tuantanah. Jadi, Pemerintah memperoleh bagian daripada

hasil bumi langsung dari penggarap dan dengan demikian dibantu dalam usaha²nja untuk mengatasi kesulitan² pangan. *Untung bagi kaum tani*, karena bisa sedikit mengurangi penghisapan yang mereka alami turun-temurun selama ber-abad², untuk sedikit memperbaiki taraf-hidup mereka serta memperkuat daya-produksi mereka. *Untung bagi revolusi*, karena mempertajam penyelesaian tugas dalam tahap pertama ini, yaitu untuk mengikis habis sisa² feodalisme.

Aksi² sefihak itu merupakan perwujudan yang jelas sekali daripada tugas „social support” dan „social control”, yaitu dukungan terhadap undang² negara dan dukungan terhadap sinjalemen yang berulang kali diucapkan oleh Presiden tentang pelaksanaan undang² yang seret, pengawasan terhadap alat² negara yang tidak mau melaksanakannya dan pengikutsertaan kaum tani sendiri yang mau melaksanakan undang² tsb. Dan sesuai dengan itu, kaum tani sudah semakin tajam dalam melakukan pengawasan terhadap alat² negara sendiri, yaitu dalam menuntut rituling terhadap penguasa² yang menentang, menghambat ataupun tidak mau membantu pelaksanaan kedua undang² itu.

Disini kita melihat suatu perpaduan antara apa yang sering dikatakan oleh Bung Karno tentang perlu adanya „revolusi dari atas dan dari bawah..... Dari atas, dengan adanya rituling terhadap aparat dan sistim, dari bawah, karena rituling aparat dan sistim itu dilakukan sesuai dengan

desakan Rakjat dan didukung pula oleh Rakjat" („Djarek", lihat *Tubapi*, hal. 241).

Demikian tjontoh dari adanya dua segi dalam kekuasaan negara dalam hal pelaksanaan tugas demokratis revolusi kita, jaitu tugas anti-feodalisme. Bisa disimpulkan bahwa, berdasarkan pengalaman² kaum tani sendiri, segi pro-Rakjat sedjauh mengenai pelaksanaan tugas anti-feodalisme ini masih lemah sekali, artinja masih terlalu sedikit pengertian dikalangan alat² negara tentang landreform sebagai bagian mutlak daripada revolusi kita.

Bagaimana halnja dengan pelaksanaan tugas² anti-imperialisme revolusi kita? Dalam hal ini, saja rasa bahwa segi pro-Rakjat semakin lama semakin berdominasi. Berkat adanya pimpinan yang konsekwen dan anti-imperialis dari Bung Karno sendiri, berdasarkan desakan yang terus-menerus dari Rakjat sendiri untuk maju terus, pantang mundur dalam melakukan politik konfrontasi terhadap imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme, maka seluruh negara kita semakin mengarahkan sepak-terdjangnja kepada musuh pokok dari revolusi kita, imperialisme dunia, terutama imperialisme AS.

Dalam hal inipun, kita dapat merasa betapa penting peranan „social support" serta „social control" yang dilakukan setjara tekun dan terus-menerus dalam bidang politik luarnegeri kita. Gerakan Rakjat terus-menerus memegang peranan

jang menentukan dalam menuntut supaya djalan yang diambil dalam menyelesaikan masalah „Malaysia" ialah djalan revolusioner, menolak djalan likwidasionis, baik jang avonturis maupun jang oportunist.

Tanpa adanya „social support", „social control" dan kesedaran politik Rakjat yang sedemikian tingginja, dapat dipastikan bahwa negeri kita sudah sedjak lama terdjerumus kedalam djalan oportunist yang mau menjerah kepada fihak musuh dengan dalih „membereskan ekonomi dahulu" atau kedalam djalan avonturis yang setjara sembrono mau „membebaskan" Rakjat Kalimantan Utara tanpa mengakui bahwa peranan Indonesia dalam hal perdjuaan ini, betapapun pentingnja, tak mungkin lebih daripada *membantu* Rakjat Kalimantan Utara dalam membebaskan diri.

Dwikora yang diumumkan oleh Presiden Sukarno pada tgl 3 Mei jl. benar² mentjerminkan djalan revolusioner, djalan Rakjat. Komando yang pertama menekankan kepada memperhebat ketahanan revolusi, artinja ketahanan nasional dalam menghadapi pergolakan dan konfrontasi dengan projek-neo-kolonialisme „Malaysia". Rumusan ini menunjukkan bahwa membereskan hal² nasional seperti misalnja ekonomi harus merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada konfrontasi itu sendiri. Maka gugurlah keinginan² mereka yang mau „membereskan ekonomi dahulu". Hubungan yang tepat telah diletakkan, jaitu ekonomi nasional harus

dibereskan dalam rangka perjuangannya melawan imperialisme dan untuk memperkuat ketahanan negeri kita dalam menghadapi perjuangannya itu. Bukan „ekonomi sekarang, anti-imperialisme nanti saja“, yang berarti ekonomi tidak akan beres dan anti-imperialisme tidak akan dilakukan, melainkan „ekonomi sekarang, anti-imperialisme juga sekarang“ sebagai jaminan ekonomi akan bisa beres dan anti-imperialisme bisa jalan terus. Ekonomi kita belum beres sekarang ini bukan karena kita terlalu banyak mengganggu imperialisme, tetapi justru karena kita belum cukup banyak mengganggu imperialisme, khususnya dibidang ekonomi.

Komando kedua daripada Dwikora dengan tepat menyatakan peranan Rakjat Indonesia, yaitu „membantu perjuangan revolusioner Rakjat² Malaya, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunai“. sedangkan tujuan perjuangannya sudah dinyatakan tanpa tedeng aling², yaitu „untuk membubarkan negara boneka 'Malaysia'“. Perintjiaan tentang tindakan² yang dibutuhkan dalam melaksanakan komando kedua ini telah disusun oleh DPA dalam sidangnja dari tgl 6 — 9 Mei jl, yaitu pertama, bahwa perundingan² hanya dapat diadakan jika benar² bersih dari pengaruh² imperialis Inggris dan AS, artinja, a.l. jika tentara Inggris ditarik mundur dari Kaltara, Malaya dan Singapura; kedua, memobilisasi sokongan seluruh Nefo kepada perjuangan untuk membubarkan „Malaysia“; dan ketiga, menjokong Pemerintah Azahari, meng-

akuinja dan membantu tentaranya dengan sukarelawan².

Dwikora sepenuhnya menggariskan jalan revolusioner dalam menghadapi „Malaysia“ karena mementingkan masalah ketahanan kita sendiri yang terutama mengharuskan kita untuk memperkuat persatuan nasional, mementingkan perjuangan dan persatuan Rakjat² didaerah „Malaysia“ sendiri, serta mementingkan sokongan dan persatuan seluruh Nefo terhadap perjuangan melawan „Malaysia“ ini.

Dilihat dari segi Dwikora, tidak berhasilnja KTT Tokio mentjapai persetujuan dalam bulan Djuni jbl. adalah wajar, karena pihak Indonesia bertudjuan membubarkan „Malaysia“ sedangkan Tengku Abdulrachman sesuai dengan politik madjikkannja Inggris, bertudjuan membubarkan pasukan² gerilja di Kalimantan Utara. Ini bukan kegagalan bagi Indonesia, tetapi penegasan lebih lanjut tentang jalan revolusioner yang ditempuh Pemerintah dan Rakjat Indonesia.

Saja menegaskan masalah Dwikora dalam rangka tjeramah ini karena ia sungguh merupakan tjontoh terbaik selama ini daripada hasil perjuangan Rakjat melalui „social support“ dan „social control“ dengan mengalahkan matjam² jalan lain yang selalu mau dipaksakan oleh unsur² anti-Rakjat dalam kekuasaan negara kita.

Tetapi walaupun kita bisa menjambut gembira hasil perjuangan ini, namun perlu ditjatat pula

bahwa adanya dua segi dalam kekuasaan negara tentu masih mendapatkan refleksinya dalam perkembangan politik luar negeri kita. Sudah diketahui umum bahwa prinsip terpenting dalam politik luar negeri RI ialah anti-imperialisme. Ini sudah jelas dari berbagai dokumen resmi, terutama tiga kerangka Manipol, dan sudah ber-ulang² ditekankan dalam pidato² Presiden Sukarno sendiri.

Dalam menjalankan politik anti-imperialis, yang harus jelas ialah siapa kawan dan siapa lawan, pertama-tama tentang siapa lawan, karena seperti Bung Karno pernah mengatakan, karena itulah yang menentukan „apa yang harus dihantam“. Masalah siapa lawan dan siapa kawan adalah segi terpenting dalam melakukan politik luar negeri anti-imperialis setjara efektif.

Ada fihak² yang suka banjak berbitjara tentang anti-imperialis, tetapi tak pernah tegas tentang siapa² imperialis yang harus dilawan itu. Rakjat Indonesia sudah ber-puluh² tahun terlatih dalam melakukan perjuangan melawan imperialisme, terutama melawan imperialisme Belanda dan akhir² ini melawan imperialisme Inggris. Pengalihan perjuangan yang lama ini memberikan satu peladjaran yang perlu sekali kita fahami, yaitu tak pernah perjuangan kita, baik melawan imperialisme Belanda maupun Inggris, bisa berlangsung tanpa sekaligus menghadapi tjumpurgangan kaum imperialis Amerika Serikat. Tjumpurgangan itu mengambil ber-

bagai bentuk seperti misalnja desakan² kepada kita untuk menjerah kepada kaum kolonialis, seperti ber-ulang² dilakukan selama Revolusi 1945 dan seperti akhir² ini mereka usahakan mengenai konfrontasi yang kita lakukan dengan „Malaysia“; intervensi tertutup atau terbuka dalam urusan dalam negeri kita, seperti misalnja selama pemberontakan „PRRI-Permesta“ dengan serangan² udara oleh serdadu bajaran imperialis AS, Pope; intimidasi kaum imperialis AS dengan Armada ke-7-nja pada waktu ini; usaha² kaum imperialis AS untuk bertindak sebagai „perantara“ antara RI dengan kolonialisme yang sedang dihadapinja yang selalu ditunjukkan kepada mematahkan semangat berjuang Rakjat kita, dsb, dsb.

Maka dapatlah kita tarik kesimpulan, bahwa baik dahulu maupun sekarang, perjuangan anti-imperialis Rakjat Indonesia walaupun umumnya menghadapi suatu imperialisme tertentu, namun musuhnja yang paling tetap, paling litjik dan paling berbahaya ialah imperialisme AS. Kenyataan ini lebih² dirasakan akhir² ini dimana kaum imperialis AS sekaligus melakukan berbagai usaha terhadap kita, Paksaan setjara „halus“ melalui „bantuan luar negeri“, paksaan setjara kasar melalui Armada ke-7, usaha² melalui saluran-luta-besar AS di Djakarta, Howard P. Jones, untuk mendesak² kepada pimpinan kita supaya mau berunding dengan „Malaysia“ dsb. Adalah tepat sekali ketika DPA menekankan dalam keputusan sidang

nja jang terachir sebagai djawaban tegas terhadap kaum imperialis AS itu, bahwa satuⁿja perundingan dengan „Malaysia” jang bisa dipertimbangkan ialah „perundingan” tanpa prasarat dan jang betul² bersih dari pengaruh Inggris dan Amerika”.

Achir² ini, seluruh Rakjat Indonesia dengan aktif melakukan peranan „social support” dan „social control” dibidang politik luarnegeri dengan melalui berbagai gerakan, terutama gerakan menolak Armada ke-7 jang mengambil bentuk boikot terhadap film² AS, aksi² melawan „peace corps” dan aksi² jang menuntut supaya duta-besar AS Jones ditakutan sebagai „persona non grata”.

Tetapi harus diingat bahwa imperialisme AS jang kita hadapi dinegeri kita tidak lagi mengambil bentuk kolonialisme klasik, melainkan mengambil bentuk kolonialisme baru atau neo-kolonialisme artinja daja-upaja kaum imperialis untuk menundukkan negeri kita setjara politis, ekonomis dan militer dilakukan tidak melalui pendudukan langsung melainkan melalui „bantuan ekonomi”, infiltrasi dibidang kebudayaan, tjampurtangan dalam urusan dalamnegeri dsb.

Oleh karena itu semua, tak tjukup kalau politik anti-imperialis dinjatakan setjara umum sebagai „menentang imperialisme dan kolonialisme”. Rumusan itu harus ditambahkan dengan dua unsur jang djustru memberikan kepadanya makna jang efektif, jaitu *perlawanan terhadap neo-kolonialisme dan*

terutama perlawanan terhadap imperialis AS. Dengan perumusan ini mendjadi djelas siapa lawan revolusi Indonesia. Kalau mau disingkat, misalnja, tak tjukup berbitjara tentang anti-kolin atau anti-imkol, tetapi harus berbitjara tentang anti-imkolneo, dan lebih² dari itu, „anti-imkolneo, terutama imkolneo AS”. Baru dengan demikian bisa dikatakan bahwa rumusan itu mengandung setjara lengkap musuh² revolusi kita jang harus kita ganjang terus-menerus. Hal ini diperkuat lagi oleh berita kemarin tentang 240.000 serdadu Amerika Serikat jang sudah siap untuk beroperasi di Asia Tenggara, dengan tulangpunggungnya Armada ke-7 AS dan perlengkapannya akan dibongkar di Muang Thai. Kaum imperialis AS mengira bahwa dengan ini Rakjat akan mendjadi takut. Tidak jang benar ialah Rakjat makin meluap kebentjiannya pada imperialisme AS.

Kalau masalah siapa lawannya Revolusi Indonesia sudah djelas, sekarang timbul masalah siapa kawannya. Masalah ini sebenarnja sudah terang sekali, tetapi sajang hal² jang sebegitu terang masih djuga ternjata „gelap” bagi sementara orang. Kawan kita dalam perdjjuangan anti-imperialis ialah „the new emerging forces” atau Nefo, tetapi masih sadja ada orang² jang menutup mata terhadap kenyataan bahwa Nefo itu merupakan suatu tri-tunggal, jaitu negeri² baru merdeka jang anti-imperialis, negeri² sosialis dan kekuatan² progresif didalam negeri kapitalis. Ada sadja orang dalam

tahun 1964 ini jang menggambarkan Nefo sebagai negeri² AA sadja, atau negeri² AAA sadja, sedangkan negeri² sosialis ditempatkan diluar barisan Nefo, dinjatakan sebagai barisan jang merupakan salahsatu fihak dalam apa jang dinamakan „cold war“, jang digambarkan sama djeleknja bahkan lebih djelek daripada fihak kaum imperialis AS. Orang² ini mengatakan bahwa „fihak Sovjet“ mau „mendjalankan revolusi dunia“ sedangkan Amerika Serikat hanja mau „membela diri terhadap bahaja Komunis“. Kalau hanja untuk membela diri mengapa AS mengirinkan begitu banyak serdadu ke Asia Tenggara jang begitu djauh letaknja dari wilajah AS?

Analisa jang menempatkan Nefo sebagai kelompok tambahan disamping fihak Barat dan fihak Timur djustru sama dengan analisa „blok ketiga“ jang sudah sedjak Konferensi Beograd dalam tahun 1961 dikritik tanpa ampun oleh Bung Karno. Nefo meliputi negara² sosialis dan hal ini tak boleh dilupakan karena negara² sosialis merupakan kekuatan pendukung jang sangat penting dalam perdjuangan anti-imperialis dari Rakjat² sedunia. Tak boleh diabaikan bahwa negara² sosialis merupakan salahsatu sumber dukungan terpenting dalam perdjuangan anti-imperialis. Tak perlu saja mengutip pidato Bung Karno ini atau pidato Bung Karno itu tentang komposisi Nefo Tjukup kalau saja sebut sadja Ganefo jang njata² meliputi djuga negara² sosialis, dan bahkan ne-

gara² sosialis Asia seperti RRT dan Korea menjapai prestasi² jang sungguh mengagumkan dalam Ganefo itu. Tetapi ada sadja orang², termasuk orang² dalam aparat negara, jang tidak mengerti atau mungkin tidak mau mengerti bahwa komposisi Nefo meliputi djuga negeri² sosialis.

Disinilah terasa peranan penting daripada „social support“ dan „social control“ dalam bidang politik luarnegeri; oleh karena itu selalu dibutuhkan perdjuangan terus-menerus untuk memenangkan pengertian tepat tentang siapa lawan dan siapa kawan Revolusi Indonesia dalam melakukan perdjuangan anti-imperialisme. Selama soal ini belum djelas bagi semua alat negara, Rakjat akan harus terus berdjuang dengan melakukan gerakan² jang kongkrit untuk membikin masalah ini mendjadi sedjelas²nja.

Satu tjontoh lagi mengenai adanja segi anti-Rakjat dan segi pro-Rakjat dalam kekuasaan negara ialah tindakan² teror ekonomi 26 Mei 1963 jang terkenal itu. Peraturan² itu ternjata tidak dapat hidup lebih dari sepuluh bulan karena perlawanan keras dari seluruh Rakjat jang sudah tjukup berpengalaman dalam menghadapi berbagai serangan terhadap ekonomi negerinja dan terhadap taraf-hidup mereka sendiri.

Tindakan² 26 Mei itu dilakukan baru dua bulan setelah diumumkannya Deklarasi Ekonomi. Seperti kita semua mengetahui, Dekon itu disambut hangat oleh seluruh Rakjat, sedangkan tindakan² 26 Mei

baru 2 bulan kemudian diprotes keras sehingga akhirnya ditarik kembali oleh Pemerintah. Bukankah ini suatu contoh yang sangat jelas tentang adanya segi pro-Rakjat yang bisa menghasilkan suatu dokumen yang revolusioner seperti Dekon dan yang mendapatkan „social support“, disamping segi anti-Rakjat yang bisa menghasilkan peraturan² 26 Mei yang begitu memukul Rakjat sehingga diprotes melalui „social control“?

Perjuangan yang dilakukan untuk menuntut pembatalan peraturan² 26 Mei telah membawa hasil pertama yaitu pembatalan peraturan² pokok yang diadakan pada tanggal 26 Mei itu. Tetapi peraturan² baru yang dikeluarkan pada tanggal 17 April 1964 masih terlalu sedikit menggambarkan keinginan Rakjat seperti yang diwakili dalam usul² yang diajukan kepada Pemerintah oleh DPRGR walaupun usul² itu hanya bersifat minimal.

Kenaikan harga samasekali belum dapat distop dengan adanya peraturan² 17 April, sebaliknya terus meningkat, dan belum ada tanda bahwa kematjetan produksi dalam negeri akan bisa didobrak. Kenyataan ini jelas menunjukkan bahwa perjuangan Rakjat masih harus dilanjutkan untuk memenangkan konsepsi² yang sesuai dengan Dekon dan yang bisa mengatasi kesulitan² ekonomi yang masih kita hadapi.

Perjuangan untuk memenangkan konsepsi² Rakjat dalam bidang ekonomi adalah penting sekali karena sudah tjukup banyak bukti bahwa kaum

reaksioner dalam negeri yang telah menjatukan diri dengan kaum imperialis dan khususnya dengan projek neo-kolonialisme „Malaysia“ sangat bernafsu dalam keinginan mereka agar ekonomi Indonesia dibiarkan menjadi semakin bobrok sehingga akhirnya ahli² merekalah yang akan ditawarkan untuk „menjelamatkan“ Indonesia dari keambrokan ekonomi. Perjuangan untuk menanggulangi kesulitan² ekonomi merupakan bagian integral dari pada perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme. Pengalaman² mengenai 26 Mei mengajarkan kepada kita, bahwa hanya prinsip berdiri diatas kaki kita sendiri, prinsip patriotisme ekonomi seperti ditekankan oleh Presiden Sukarno dalam Gesuri, bisa membuka kemungkinan bagi kita untuk mengatasi kesulitan² ekonomi dan sekaligus mengakhiri tjampurtangan kaum imperialis dalam urusan ekonomi negeri kita. Dengan demikian jelaslah bahwa perjuangan Rakjat Indonesia menuntut penghapusan peraturan² ekonomi 26 Mei 1963 merupakan bagian integral dari pada perjuangan untuk melawan intervensi imperialis.

Sebagai akhir kata dalam membahas tugas² khusus „social support“ dan „social control“ dalam revolusi Indonesia dewasa ini, perlu ditekankan bahwa ada „social control“ yang efektif dan ada yang kurang efektif. „Social control“ yang seratus persen efektif dan sebagai hasilnya memperkuat „social support“ hanyalah bisa terjdjadi didalam

sistim masyarakat Sosialis. „Social control” yang efektif pada pokoknya bisa terdjadi djika diantara pemerintah atau negara tidak terdapat kontradiksi yang tadjam dengan Rakjat banjak. Ini berarti djuga bahwa pemerintah atau negara itu sungguh² mentjerminkan atau mewakili keinginan dan kepentingan Rakjat banjak. Djadi, meskipun pemerintahan atau negara itu benar² sudah satu haluan politiknja dengan yang dikehendaki oleh Rakjat banjak, tetapi „social control” itu tetap diperlukan.

Oleh karena itu adalah mutlak perlu dilakukan dan malahan dilakukan dengan seluas mungkin „social control” terhadap pemerintah dan segala aparat negara Republik Indonesia oleh Rakjat banjak, djustru karena Pemerintah dan segala aparatnja mempunyai garis dan pedoman politik yang satu seperti yang dimiliki oleh Rakjat banjak, ialah Manipol dengan segala pedoman pelaksanaannja. Djadi „social control” ini mutlak diperlukan, karena ia djustru merupakan djaminan yang tepertjaja bagi pelaksanaan garis² besar haluan negara, jaitu Manipol, jaitu djaminan bahwa pemerintah dan segala aparatnja benar² berbitjara dan bertindak sesuai dengan isi dan semangat Manipol. Hanya dengan berbuat demikian Republik kita serta segenap aparatnja akan mendapat „social support” yang diperlukan.

Sjarat² Pelaksanaan „Social Support” dan „Social Control”

Diatas, telah saja djelaskan bahwa „social support” dan „social control” mempunyai hubungan erat dengan tugas untuk menyelesaikan revolusi Indonesia, bahkan hal yang mutlak perlu kalau mau menyelesaikan tuntutan² revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja. Problem yang terachir yang saja anggap perlu diadjukan ialah tentang sjarat² pelaksanaannja. Masalah sjarat² ini memang djuga diadjukan dalam pokok² yang diminta dari saja oleh pimpinan SESKOAD dimana ditanjakan : „Apa masalah² untuk mensukseskan Sistim Penjelenggaraan Social Support dan Social Control tersebut”? Pertanyaan itu saja anggap tepat karena apa saja yang baik tak mungkin terselenggara djika tidak tersedia sjarat²nja.

Masalah ini membawakan kita langsung kepada masalah kedudukan partai² politik, karena partai² itu memang merupakan saluran terpenting bagi „social support” dan „social control”. Sudah dari dulu, terdengar suara² beratjun yang menjebarkan ide bahwa sistim kepartaian tak punya hak hidup

lagi dalam alam demokrasi terpimpin. Usaha² untuk mematikan peranan partai² politik telah mengambil berbagai bentuk. Mula² ada yang menganjurkan supaya partai² politik dibubarkan sadja, kemudian pada waktu Front Nasional sedang dalam proses pembentukannya ada yang mau menjadikan Front Nasional itu sebagai satu²nja Partai. Dan akhir² ini ada kalangan² yang menggembar-gemborkan tentang perlu adanya satu partai sadja, dengan menyalahgunakan utjapan² Presiden Sukarno tentang „suatu partai pelopor“.

Pengertian² ini adalah keliru sekali dan berlawanan dengan tudjuan revolusi kita. Bukankah suatu kenyataan yang tak bisa disangkal bahwa lahirnya gerakan nasional dinegeri kita djustru dimulai dengan lahirnya partai² politik, bahwa sedjarah gerakan nasional kita adalah sedjarah berkembangnya partai² politik, malahan lahir dan berkembangnya nasion Indonesia sendiri tak mungkin di-pisah²kan dari lahir dan berkembangnya partai² politik dinegeri kita.

Partai² politik merupakan alat² klas untuk memperjuangkan kepentingan² klas. Revolusi Indonesia pada tahap sekarang merupakan revolusi dimana semua klas anti-imperialis ikut serta didalamnya dengan tudjuan melawan imperialisme, musuh pokok Rakjat Indonesia. Dengan demikian partai² politik revolusioner tidak hanya alat klas atau golongan tertentu tetapi djuga alat nasion untuk memenangkan revolusi nasional. Partai² politik re-

volusioner sudah merupakan alat revolusi sedjak sebelum Revolusi Agustus 1945. Karena revolusi Indonesia dewasa ini adalah revolusinya berbagai klas, maka tidaklah mengherankan kalau ada berbagai partai. Bahkan djustru seandainya hanya terdapat satu partai seperti apa yang diandjurkan sementara orang, adalah samasekali tidak sesuai karena tak bisa membuka kemungkinan bagi setiap klas untuk memberi sumbangannya se-besar²nja dalam perdjungan anti-imperialis.

Disamping itu, ada djuga kalangan yang berusaha menjebarkan ide bahwa kegiatan² partai seperti misalnja kegiatan²nja melalui berbagai media termasuk pers, gerakan² massa, aksi² yang digerakkan dari bawah untuk menuntut rituling merupakan „gedjala² liberalisme“. Tentu kesimpulannya jalah bahwa kegiatan² „liberal“ itu dus harus diberantas.

Apakah benar sangkaan sementara orang bahwa kegiatan² partai, tuntutan² tentang rituling, aksi² massa untuk menuntut ini atau itu dari Pemerintah, dsb. perlu ditjela sebagai „gedjala² liberalisme“ yang harus diberantas? Tentu hal ini adalah sama sekali tidak benar! Tjebalah batja Tubapi, yang terdiri dari lebih 800 halaman. Tidak satu katapun disitu yang sedikit mengantjam hak partai² politik untuk hidup dan bergerak. Bahkan sebaliknya, Dalam „Djarek“, Presiden berkata bahwa program revolusi, jaitu Manipol, harus mendjadi program setiap partai yang djuga harus ambilbagian dalam

melaksanakan program tsb. Dengan mengutip Manipol, Presiden berkata dalam „Djarek”: „Sudah tentu tiap partai, organisasi dan perseorangan boleh mempunyai kejakinan politiknya sendiri, boleh mempunyai program sendiri” (*Tubapi*, hal. 208).

Berbitjara tentang rituling sistim kepartaian, Presiden dengan tegas menyatakan bahwa Penetapan Presiden No. 7, 1959 dan Peraturan Presiden No. 13, 1960 „pada pokoknya tegas² memberi hak-hidup kepada partai² yang ber-USDEK” (*Tubapi*, hal. 211). Dan lebih tegas lagi dikatakan oleh Presiden selanjutnya dalam pidato Djarek itu sbb: „Dengan tegas saja katakan disini bahwa partai itu, dengan memenuhi semua syarat² perundang-undangan kepartaian, diberi hak hidup, diberi hak bergerak, diberi hak perwakilan — sudah barang tentu dalam rangka Demokrasi Terpimpin. Partai yang demikian itu dapat memberi sumbangan besar kepada terlaksananya Amanat Penderitaan Rakyat”.

Perlu ditekankan dalam hubungan ini, bahwa kritik² terhadap partai² sungguh tak beralasan, apalagi mengingat bahwa djustru partai² itu yang sudah mengalami rituling seperlunya sehingga partai² yang ada umumnya berpegang kepada Manipol dan Nasakom. Bidang² lain malahan bisa mengambil tjontoh dari rituling dan perkembangan dalam sistim kepartaian. Kalau semua bidang telah melaksanakan rituling sampai taraf yang telah dilak-

sanakan dalam bidang kepartaian, kita sungguh² akan bisa makin mendekati tudjuan revolusi kita dalam tahap pertama ini. Sistim kepartaian di Indonesia adalah pelopor dalam rituling.

Liberalisme yang dihantam berulang kali oleh Bung Karno dalam berbagai pidato bukanlah kegiatan² partai² politik melainkan politik² reaksioner, sikap yang membiarkan kegiatan² kaum reaksioner sampai kepada membiarkan pemberontakan dan subversi asing, semuanya atasnama „demokrasi”. Dalam Manipol, Presiden Sukarno dengan jelas sekali menerangkan tentang apa liberalisme itu. Disitu dikatakan sbb: „Bapakisme, daerahisme, politik territorial sendiri², dewan-dewan, PRRI, Permesta dan lain² borok dan koreng sematjam itu, pada hakekatnya semua ber-ibu kepada liberalisme yang membolehkan setiap orang sa-kersa²nja sendiri, ketambahan lagi dengan kipasannya dan bantuannya subversi asing. Stop keadaan yang demikian itu!” (Lihat pidato *Manipol*, dalam *Tubapi*, hal. 121). Njata sekali bahwa apa yang dimaksudkan dengan liberalisme oleh Bung Karno bukanlah kegiatan² partai, aksi² dsb., melainkan kegiatan² kaum reaksioner dalam menghambat dan menggerowoti penjurusan kekuatan revolusi kita.

Demokrasi Terpimpin setjara hakekat berbeda dengan itu djustru karena tidak membiarkan kaum reaksi untuk menggerowoti dasar² negara kita. Demokrasi Terpimpin adalah tetap demokrasi, tetapi demokrasi yang tidak sudi memberikan hak-

hidup kepada kaum reaksioner karena kaum reaksioner itu djustru bermaksud untuk mematikan demokrasi itu dan mendjual negeri kita kepada kaum imperialis. Demokrasi liberal membiarkan kaum reaksioner untuk menggunakan demokrasi sebagai selimut dalam melakukan kegiatan² anti-demokratis mereka. Demokrasi terpimpin memastikan Manipol sebagai konsepsi yang harus memimpin semua, dan setjara wadjar hanja memberi hak-hidup kepada mereka yang demokratis. Ini bedanja antara demokrasi palsu dan demokrasi sedjati.

Bung Karno sendiri sudah berulang kali berbitjara tentang peranan partai² politik. Bahkan dalam bukunya *Mentjapai Indonesia Merdeka* yang ditulis dalam tahun 1933, dimuat suatu bab khusus yang berjudul „Gunanja Ada Partai”. Dalam bab itu, Bung Karno dengan gamblang mendjelaskan peranan massa-aksi sebagai peranan revolusioner dan bukan peranan reformis, jaitu peranan „sebagai penghantar pada saat masyarakat tua melangkah kedalam masyarakat baru” (*Dibawah Bendera Revolusi*, hal. 281). Dan siapa menurut Bung Karno yang harus memimpin massa aksi itu? Partai² politik, demikian djawabnja. „Partailah yang memimpin massa itu didalam perjuangannja merebahkan musuh, partailah yang memimpin komando daripada barisan massa”. (*Dibawah Bendera Revolusi*, hal. 282). Demikian tugas revolusioner yang diletakkan oleh Bung Karno atas pundak partai². Bahkan peranannja bersifat mutlak bagi

tertjapainja kemenangan. Tentang ini Bung Karno berkata: „Kemenangan sudah bisa datang, bilamana ada satu partai yang gagah-berani dan bewust mendjadi *pelopor sedjati* daripada massa” (*Dibawah Bendera Revolusi*, hal. 283).

Tetapi kalau Bung Karno berbitjara tentang „satu partai”, maksudnja samasekali bukan „satu²-nja partai”. Yang dimaksudkan ialah *satu partai pelopor*, jaitu partai „yang paling baik dan paling sempurna”. Selandjutnja dikatakan: „Bisa ada partai lain² yang ikut berdjuaang, ikut memimpin, tetapi tidak sebagai komandan seluruh tentaranja massa, melainkan hanja sebagai sersan² atau kopral² sadja”. (*Dibawah Bendera Revolusi*, hal. 284).

Andjuran Bung Karno dinuka Kongres PNI di Purwokerto tahun yang lalu kepada semua partai untuk ber-lomba² atau berkompetisi dalam memperdjuaangkan Manipol adalah sepenuhnya sesuai dengan konsepsi tentang partai pelopor itu. Andjuran itu menjerukan kepada partai² supaya mereka mendjadi giat terus-menerus demi terlaksananya program revolusi kita, jaitu Manipol. Perlombaan ini mengharuskan kepada semua partai untuk memperhebat amalnja kepada Rakjat demi men-sukseskan Manipol. Dan walaupun perlombaan itu pasti achitnja akan menghasilkan satu partai pelopor, ini samasekali tidak berarti bahwa partai itu „menang” dan yang lain²nja „kalah”. Dalam perlombaan yang demikian, kemenangan ada difihak

Rakjat seluruhnja, karena kemenangan berarti kemenangan program kita bersama, jaitu Manipol. Jang kalah hanja imperialisme dan feodalisme. Djadi, silahkan semua partai berdjuaug untuk mendjadi partai pelopor, PKI djuga sudah dan akan terus berdjuaug untuk itu.

Melakukan „social support” dan „social control” jang tudjuannja jalah menjelesaikan revolusi, bukan hanja mendjadi hak daripada partai² tetapi malahan mendjadi kewadajibannja karena, seperti didjelaskan oleh Bung Karno, kemenangan revolusi memang tergantung daripada perdjuaugan massa jang dipimpin oleh partai².

Dari ini semua dapat kita simpulkan, bahwa adanja partai² jang Manipolis merupakan sjarat pertama bagi terselenggaranja „social support” dan „social control”.

Disamping partai, djuga harus ada organisasi² massa (ormas²) jang mempunjai fungsi jang chusus dalam menggerakkan massa untuk memenangkan tuntutan² chusus menurut bidangnya. Ormas² memegang peranan jang penting sekali karena mereka dapat memperhatikan setjara lebih spesifik kebutuhan² dan tuntutan² golongan tertentu, misalnja kebutuhan² dan tuntutan² kaum tani, kebutuhan² dan tuntutan² kaum buruh, kebutuhan² dan tuntutan² pemuda, peladjar dan mahasiswa, kebutuhan² dan tuntutan² kaum wanita, dsb.

Selanjutnja, sjarat jang sangat penting bagi terselenggaranja „social support” dan „social con-

trol” jalah adanja kebebasan demokratis bagi partai² politik dan ormas² dalam melakukan kegiatan² nja. Sungguh suatu keanehan djika partai² dan organisasi² diakui mempunjai hak hidup, seperti dikatakan dengan djelas oleh Bung Karno dalam Manipol, Djarek dll., tetapi difihak lain ada orang² berkuasa jang mau mengekang partai² dan ormas² dengan melarang ini dan melarang itu, dengan menahan pemimpin² mereka jang sedang memimpin aksi massa, jang sedang mengambilalih perusahaan² Inggris sesuai dengan politik konfrontasi disemua bidang dsb, dsb.

Salahsatu alat penting lainnja untuk melakukan „social support” dan „social control” jalah Dewan² Perusahaan jang dapat merupakan saluran efektif terutama dalam mengikutsertakan semua fihak jang bersangkutan dalam usaha² melantjarkan djalannja perusahaan. Djuga pers Manipolis merupakan saluran „social support” dan „social control” jang amat penting.

Sembojan PKI „Tripandji Bangsa untuk Demokrasi, Persatuan, Mobilisasi !”

Dalam Kongres ke-VII (Luarbiasa) CC PKI yang diadakan dalam bulan April tahun 1962, PKI telah mengadjudkan suatu sembojan baru, jaitu *Tripandji Bangsa: Pandji Demokrasi, Pandji Persatuan dan Pandji Mobilisasi*. Sembojan itu diserukan untuk mensukseskan perjuangannya membebaskan Irian Barat dan selanjutnya telah dikembangkan terus untuk menghadapi tugas² urgen yang harus dilaksanakan oleh Rakjat Indonesia. Sembojan itu berarti, bahwa perjuangan revolusioner tak mungkin mentjapai sukses kalau tidak ada demokrasi. Demokrasi adalah sjarat mutlak untuk memperkuat persatuan nasional, untuk dapat memobilisasi segenap potensi nasional. Harus senantiasa diingat, bahwa bagaimanapun Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi; djika tidak, tentu namanja akan lain.

Kegiatan² „social support” dan „social control” berarti memobilisasi segenap potensi nasional untuk mengawasi dan memberi dukungan kepada pelaksanaan program Pemerintah dan pelaksanaan

program revolusi. Sjarat mutlak dalam mensukseskan mobilisasi itu ialah adanya demokrasi — tertunja, demokrasi untuk Rakjat dan bukan demokrasi untuk musuh² Rakjat. Oleh karena itu, perjuangan yang dilakukan oleh segenap Rakjat untuk mempertahankan kebebasan² demokratis dan untuk memperluas kebebasan² itu merupakan bagian integral daripada perjuangan untuk menyelesaikan tuntutan² revolusi sampai ke-akar²nja.

Selama beberapa tahun terakhir ini, Rakjat Indonesia telah melakukan perjuangan sengit untuk kebebasan² demokratis dengan didijwai oleh kesedaran politik yang tinggi. Berkat perjuangan sengit itu, pada pokoknya telah dapat digagalkan usaha² untuk mengadakan „SOB tanpa SOB” walaupun masih ada sadja tindakan² untuk mempertahankan keadaan „SOB” dalam alam tertib-sivil yang sekarang berlaku. Sedjak berachirnja SOB pada tgl 1 Mei 1963, telah terdjadi suatu perluasan sedikit demi sedikit dalam kebebasan² demokratis, misalnja dalam bidang penerbitan surat kabar², brosur², madjalah² dsb., dalam hal mengadakan rapat², dan dalam melakukan kegiatan² politik pada umumnya. Semuanya ini sangat penting baik bagi pengganjangan „Malaysia” maupun bagi pengganjangan kontra-revolusi dalam negeri, peningkatan produksi dsb., pendeknja bagi perjuangan anti-imperialisme dan anti-feodalisme pada umumnya.

Dalam keadaan demikian telah terdjadi suatu

gelombang naik dalam perjuangannya Rakjat Indonesia untuk melakukan „social support” dan „social control”. Ini dapat dibuktikan dengan berbagai aksi yang sudah atau sedang dilakukan untuk menuntut rituling orang² anti-Manipolis dan menuntut nasakomisasi semua sektor kehidupan, terutama kehidupan politik dan ekonomi. Bahkan tuntutan² supaya PARAN dirituli dan diganti dengan aparat rituling yang berporoskan Nasakom dibawah pimpinan Presiden Sukarno sendiri, sesuai dengan DEKON, telah mulai berhasil dengan pembubaran PARAN dan pembentukan KOTRAR. Kedjadian ini telah lebih membangkitkan lagi kegiatan² organisasi² massa revolusioner untuk menuntut rituling, seperti dapat kita lihat, misalnya, dalam aksi² yang sedang dilantjarkan dalam menuntut supaya perguruan tinggi dimanipolkan, terutama sesudah Manikebu dilarang oleh Presiden Sukarno.

Semua perkembangan ini menandakan bahwa perkembangan politik dinegeri kita sedang berkembang dengan baik sekali, artinja baik untuk Rakjat termasuk TNI, dan hanya tidak baik untuk musuh² Rakjat, artinja baik untuk revolusi dan tidak baik untuk kontra-revolusi. Dengan semakin berkembangnya hak² demokrasi dan dengan semakin berkembangnya „social support” dan „social control”, dapat dipastikan, bahwa kemenangan revolusi semakin dekat. Tetapi optimisme ini tidak boleh membikin kita lupa, bahwa musuh² Rakjat

tidak tinggal diam dan malahan akan menjadi semakin nekad, dan akan berusaha dengan segala daya-upaja untuk membendung kemadjuan lebih lanjut. Usaha² yang terutama dilakukan oleh kaum imperialis ialah memetjah-belah: memetjah-belah persatuan antara Bung Karno dengan Rakjat, antara Bung Karno dengan PKI, memetjah-belah persatuan Nasakom, mengadudomba TNI dengan PKI dan Kepolisian Negara dengan PKI dsb. Oleh karena itu, lebih² daripada sebelumnya diperlukan persatuan nasional yang harus terus-menerus dikonsolidasi. Oleh karena itu, kegiatan² „social support” dan „social control” harus dilakukan dengan tjara² yang sekaligus mengkonsolidasi persatuan nasional, persatuan segenap potensi nasional, termasuk pula Angkatan Bersendjata. Seperti digariskan oleh Manipol: Konsentrasi semua kekuatan nasional — inilah tugas, sendjata dan djaminan kemenangan kita.

Mudah² an sembojan „Dwitunggal Rakjat dan Angkatan Bersendjata” akan terus berkembang sebagai salahsatu sjarat mutlak bagi tertjapainya tudjuan seluruh Rakjat Indonesia, jaitu penyelesaian revolusi nasional-demokratis sebagai tahap yang mutlak harus dilalui sebelum memulai tugas revolusioner kita selanjutnja, jaitu pembangunan masyarakat sosialis Indonesia.

ISI

Sekedar pengantar	3
1. Masalah Revolusi-dan Kekuasaan Negara Dalam Hubungannya dengan „Social Support” dan „Social Control”	11
2. Kekuasaan Negara di Indonesia Sekarang dan Tugas ² Khusus „Social Support” serta „Social Control” Dewasa ini	26
3. Sjarat ² Pelaksanaan „Social Support” dan „Social Control”	49
4. Sembojan PKI „Tripandji Bangsa Untuk Demokrasi, Persatuan, Mobilisasi I”	58

SIP No. 440/JL/1964 — 10.000 ex.
P.I.R. 392/1964